BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pertanggungjawaban Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan kami terima dengan senang hati. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Barabai, Desember 2025
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHIDDIN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1

B. Dasar Hukum I-2

C. Tugas dan Fungsi I-3

D. Susunan Organisasi I-4

E. Isu-Isu Strategis I-5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran II-1

B. Strategi dan Kebijakan II-3

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II-4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi…..... III-1

B. Realisasi Anggaran III-17

C. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Organisasi lainnya III-22

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan IV-1

B. Langkah Tindak Lanjut IV-2

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	II-3
Tabel II.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	II-4
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tujuan Jangka Menengah	II-6
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Sasaran Jangka Menengah	II-7
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan	II-8
Tabel III.1	Kategori Capaian Kinerja	III-1
Tabel III.2	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025	III-2
Tabel III.3	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025	III-2
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra.....	III-4
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra).....	III-5
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025 dengan Target Tahun 2030	III-8
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025 dengan Target Tahun 2030	III-8
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	III-11
Tabel III.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	III-12
Tabel III.10	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Untuk Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025	III-13
Tabel III.11	Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	III-19
Tabel III.12	Perbandingan Nilai SAKIP se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2025.....	III-25
Tabel III.13	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Tujuan dan Sasaran organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tujuan Strategis Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan indikator untuk mengukur capaian kinerjanya adalah :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah.	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
		Indeks Inovasi Daerah

Adapun Sasaran Strategisnya dengan indikator untuk mengukur capaian kinerjanya adalah:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan
		Nilai Komponen Perencanaan SAKIP
2	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian IKU RKPD
		% PD yang berkinerja tinggi
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah
		Indeks Inovasi Perangkat Daerah
		Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan

Adapun realisasi pencapaian tujuan dan sasaran di atas untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2025 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,19 % dari target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian adalah 98,94 % dari target yang ditetapkan.
3. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan.
4. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan pada aspek kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kualitas layanan internal perangkat daerah juga menunjukkan hasil yang baik, Sebaliknya, penurunan capaian kinerja terjadi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat kematangan inovasi.
5. Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu nilai komponen perencanaan SAKIP dan inovasi daerah.

Kinerja realisasi keuangan cukup efektif dan efisien dengan tingkat capaian realisasi keuangan mencapai 77,05 %. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp10.177.247.649,00, realisasi anggarannya sebesar Rp7.841.089.632,00. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai sasaran masih mengalami hambatan dan masalah yaitu berupa hambatan yang bersifat administratif dan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM. Dalam rangka peningkatan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun-tahun yang akan datang, agar dilakukan peningkatan komitmen, kapasitas dan kualitas SDM dan perbaikan proses perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah *(legitimate)*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tugas pokok menangani urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu melakukan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk informasi pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk laporan akuntabilitas Bappelitbangda Kab. HST atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan atas penggunaan anggaran, dimana yang menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai akan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Dasar Hukum

Penyusunan laporan ini mengacu pada dasar-dasar hukum yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021- 2026;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025;
14) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025;
15) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pelaksanaan riset, pengembangan, dan penguatan inovasi daerah.

2. Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

   Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi yaitu:

   1. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi;
   2. Penyelenggaraan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi;
   3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

1. K e p a l a
2. Sekretaris, membawahkan:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan:
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ini pada dasarnya terbagi atas 3 aspek, yaitu:

1. Tugas Perencanaan

   Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan fungsi utama yang berperan dalam menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan daerah agar selaras dengan visi Bupati selaku kepala daerah dan kebijakan nasional.

2. Tugas Pengendalian dan Evaluasi

   Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban memastikan bahwa **pembangunan daerah berjalan tepat sasaran, tepat**

waktu, dan sesuai dengan rencana, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

3. Tugas Penelitian dan Pengembangan

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertindak sebagai pusat pemikiran strategis pemerintah daerah yang mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian/riset dan pengembangan hasil penelitian sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berbasis data dan berkelanjutan.

E. Isu-isu Strategis

Permasalahan pokok yang dirasakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah.
   Permasalahan pokok ini disebabkan :
   a. Belum optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
   b. Belum optimalnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah;
   c. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi hasil pembangunan;
   d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
   e. Kurang optimalnya kualitas SDM perencana PD;
   f. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.
   Permasalahan pokok ini disebabkan oleh :
   a. Belum optimalnya penerapan manajamen risiko dalam perencanaan;
   b. Belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja;
   c. Kurang optimalnya koordinasi, kolaborasi antar pemerintahan dan internal pemerintahan;
   d. Kurangnya acuan keterpaduan rencana aksi;
   e. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Belum tingginya inovasi pemerintah daerah.
   Permasalahan pokok ini disebabkan oleh :
   a. Belum optimalnya kualitas hasil litbang dan inovasi daerah

b. Tidak ada SDM peneliti, lemahnya inovasi PD, belum optimalnya data dan informasi, lemahnya identifikasi kebutuhan litbang, kurangnya desiminasi hasil litbang, belum optimalnya jejaring litbang;
c. Kurangnya pengajuan HAKI;
d. Kurangnya informasi tentang HAKI;
e. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAKI.

4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.
   Permasalahan pokok ini disebabkan oleh :

   a. Belum optimalnya perencanaan kinerja urusan perencanaan dan litbang daerah;
   b. Belum optimalnya penyusunan perencanaan strategis;
   c. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi;
   d. Belum optimalnya pemenuhan pengukuran kinerja;
   e. Belum optimalnya pelaksanaan dan pengukuran kinerja;
   f. Belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja;
   g. Belum optimalnya implementasi pengukuran kinerja;
   h. Belum optimalnya penyajian dan kualitas informasi kinerja;
   i. Belum optimalnya evaluasi dan pelaporan serta pencapaian sasaran kinerja;
   j. Belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang berkualitas yang mempertimbangkan keselarasan dan konsistensi aspek tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, serta perencanaan pusat dan provinsi serta kepentingan masyarakat.
2. Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan penerapan manajemen risiko.
3. Peningkatan inovasi untuk pencapaian kinerja yang didukung juga dengan perbaikan kebijakan dengan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan
4. Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan urusan perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu periode tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis Bappelitbangda mencakup tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran berupa strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan Renstra yang berorientasi hasil, maka setiap tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan alat ukur keberhasilan serta target tahunan yang akan dicapai. Target kinerja setiap indikator tersebut merupakan bagian dari perencanaan kinerja yang harus diukur untuk mengetahui keberhasilan perencanaan. Untuk tahun 2025 perencanaan kinerja adalah sebagai berikut.

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan jangka menengah Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan RPJMD sesuai urusan pemerintahan daerah yang diemban sebagai hasil akhir atau kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian tujuan RPJMD yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah: Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah.

Kebijakan pemerintah yang berkualitas dicirikan dengan kebijakan yang diambil berdasarkan rasionalitas, teliti dan sistematis berdasarkan data informasi dan fakta serta kajian yang mendalam atau *evidence-based policy.*

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan. Indikator kinerja tujuan yang digunakan adalah:

1. Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Indeks Inovasi Daerah

Tabel II.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
		Indeks Inovasi Daerah

2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Meningkatnya Pencapaian sasaran pembangunan daerah;
c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah;
d. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan dan litbang.

Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	• Indeks Perencanaan • Nilai Komponen Perencanaan SAKIP
		Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	• Persentase capaian IKU Renja RKPD • % PD yang berkinerja tinggi
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	• Rata-rata tingkat kematangan inovasi daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan perangkat daerah	• Nilai SAKIP Perangkat Daerah • Indeks Inovasi PD • Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Bappelitbangda mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah;
3. Peningkatan kualitas litbang dan inovasi daerah;
4. Peningkatan fasilitasi pengajuan HAKI;
5. Peningkatan penyusunan perencanaan kinerja perangkat daerah;
6. Peningkatan pelaksanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah;
7. Peningkatan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

2. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi perangkat daerah. Arah Kebijakan yang ditempuh untuk perwujudan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konsistensi dan keselarasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel;
4. Mengoptimalisasi pemanfaatan SIPD dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
5. Implementasi sistem e-Monev berbasis indikator kinerja;
6. Peningkatan kualitas SDM Perencana;
7. Peningkatan penyediaan data dan informasi;
8. Peningkatan penyusunan perencanaan berbasis manajemen risiko;
9. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja rencana Pembangunan;
10. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintahan dan intern pemerintahan;
11. Peningkatan keterpaduan rencana aksi Pembangunan;
12. Peningkatan pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan;
13. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antar Lembaga;
14. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi Pembangunan;
15. Peningkatan kapabilitas penyusunan kebutuhan litbang;
16. Peningkatan diseminasi dan penerapan hasil litbang;
17. Peningkatan jejaring kelembagaan litbang;
18. Peningkatan edukasi masyarakat tentang HAKI;
19. Peningkatan penyusunan perencanaan strategis kinerja tahunan perangkat daerah;
20. Peningkatan pemenuhan pengukuran kinerja perangkat daerah;
21. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah;
22. Peningkatan implementasi pengukuran kinerja perangkat daerah;
23. Peningkatan penyajian dan kualitas informasi kinerja perangkat daerah;
24. Peningkatan pemanfaatan informasi kinerja perangkat daerah.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, maka Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tujuan

Perjanjian kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tujuan Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	98
		Indeks inovasi daerah	48

2. Perjanjian Kinerja Sasaran

Perjanjian kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Sasaran Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah		Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		98
2				Indeks Inovasi Daerah		48
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	Indeks Perencanaan	100	97
			Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	22,90	22,90

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan daerah	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD	Persentase capaian IKU RKPD	95	94
			Persentase rata-rata capaian Target IKU Renja PD	% PD yang berkinerja tinggi	97	89,24
			Persentase Program kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD		100	-
5	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	100	60
6	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	84	84,50

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase Penyerapan Anggaran	-	90	-
			-	Indeks Inovasi Perangkat Daerah	-	45
			-	Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan	-	75

3. Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan

Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah**	**Indeks Perencanaan**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu**	**100%**		**100%**	
		Nilai Perencanaan Kinerja pada SAKIP		**Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti**	**100%**		**100%**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Keg] Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***Persentase pemenuhan standar dokumen perencanaan***	***100%***		***100%***	
			[Subkeg] Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2 dok	106.608.000	-	-
			[Subkeg] Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 dok	-	-	-
			[Subkeg] Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 berita acara	50.000.000	2 berita acara	66.003.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara musrenbang kabupaten/ kota	2 berita acara	120.000.000	2 berita acara	243.828.300
			[Subkeg] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 dok	1.750.000.000	3 dok	1.292.225.150
			[Keg] Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase pelaporan sesuai standart dan tepat waktu***	***100%***	***-***	***100%***	
			[Subkeg] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	-	8 laporan	167.441.300

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			Pembangunan Daerah					
	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Persentase Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD)**	**100%**		**100%**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
		Persentase rata-rata capaian target IKU Renja PD	***[Keg] Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***	***100%***		***100%***	
			[Subkeg] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok		2 dok	39.727.700

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang. Pemerintahan	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Lap		2 laporan	104.545.100
			[Subkeg] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manuasia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok		2 dok	124.907.750

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang. Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	**1 Lap**		**1 Lap**	297.300.300
			[Keg] Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang Perekonomian dan SDA***	***100%***		***100%***	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	26.000.000	2 dok	28.891.700
			[Subkeg] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	650.000.000	1 Lap	564.940.700
			[Subkeg] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Lap	12.000.000	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Lap	12.000.000	-	-
			[Keg] Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang infrastruktur dan kewilayahan***	***100%***		***100%***	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	27.000.000	2 dok	32.703.000
			[Subkeg] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	650.000.000	1 Lap	938.310.400
			[Subkeg] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Lap	12.000.000	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Lap	12.000.000	-	-
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Dayaguna Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang diberdayag unakan	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti utk penyusunan kebijakan daerah (ada yg menjadi inovasi)**	**85%**		**100%**	
				Persentase pemanfaatan hasil litbang menjadi inovasi)	**100%**		**100%**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Keg] Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan***	***100%***		***100%***	
			[Subkeg] Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1 Lap	252.179.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Keg] Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	***Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan kan***			**100%**	
			[Subkeg] Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Topik Kajian Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang terlaksana			1 dok	165.1325.200
			[Keg] Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan***			***100%***	
			[Subkeg] Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha			1 dok	508.709.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
				Kecil dan Menengah				
			[Keg] Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan**	**100%**		**100%**	
			[Subkeg] Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yg bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 lap		1 dok	203.097.100
			[Subkeg] Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Lap		1 Lap	39.745.050

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
Meningkatkan tata kelola Internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pegawai yang berkinerja baik**			**100 %**	
		Persentase Penyerapan Anggaran		**Persentase Temuan pemeriksaan / audit yg ditindaklanjuti**			**100%**	
				Persentase Administrasi BMD yang lengkap dan sesuai			**100%**	
				Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian			**100%**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
				yang ditindaklanjuti				
				Persentase Administrasi kepegawaian yang selesai			100%	
				Persentase penyediaan dokumen anggaran , penatausahaan dan laporan keuangan tepat waktu			100%	
			[Keg] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi sesuai standart dan selesai tepat waktu*	*100%*		*100%*	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	23.000.000	1 dok	21.999.950
			[Subkeg] Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	9.000.000	2 dok	7.999.850
			[Subkeg] Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	8.000.000	1 dok	6.961.300

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	8.000.000	2 dok	6.999.795
			[Subkeg] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 dok	7.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Keg] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***	***100 %***		***100%***	
			[Subkeg] Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 OB	3.200.000	224 OB	3.956.917.086
			[Subkeg] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dok	205.320.000
			[Subkeg] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			12 dok	6.987.898

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	14.000.000	1 dok	20.995.498
			[Subkeg] Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dok	9.000.000	4 dok	43.165.500
			[Subkeg] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dok	1.000.000	1 dok	1.999.800
			[Keg] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Penyelesaian Administrasi***	***100%***		***100%***	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
				BMD PD tepat waktu				
			[Subkeg] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	3.500.000	12 Lap	4.353.800
			[Keg] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Penyelesaian Administrasi Pegawai PD yg di layani tepat waktu***	***100%***			
			[Subkeg] Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	4.500.000	2 unit	6.729.996
			[Subkeg] Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 paket	124.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	9.000.000	20 dok	12.160.000
			[Subkeg] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	50.000.000	10 Org	45.275.500
			[Subkeg] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	50.000.000	10 Org	52.500.000
			[Keg] Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar***	***100%***		***100%***	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	1 Paket	1.944.000
			[Subkeg] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	1 Paket	118.260.000
			[Subkeg] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	1 paket	67.274.200
			[Subkeg] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 paket	19.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	2.000.000	730 dok	2.000.000
			[Subkeg] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	13.000.000	4 Lap	47.300.000
			[Subkeg] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	135.000.000	4 Lap	299.634.000
			[Keg] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100 %**		**100%**	
			[Subkeg] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1.800.000	4 Lap	1.484.220

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Lap	69.750.000	4 Lap	71.240.000
			[Subkeg] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	130.000.000	81 Lap	356.046.000
			[Keg] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***	***100%***		***100%***	
			[Subkeg] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 unit	18.000.000	1 unit	66.814.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
				dibayarkan Pajaknya				
			[Subkeg] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	33.000.000	22 unit	219.608.000
			[Subkeg] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	16.000.000	30 unit	34.600.000
			[Subkeg] Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.000.000	1 unit	98.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2025			
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			[Subkeg] Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.000.000	20 unit	18.300.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Dalam implementasi Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tahun 2025-2029 maka untuk mengukur akuntabilitas organisasi digunakan beberapa indikator. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output,* bisa berupa pemanfaatan *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek *(intermediate outcome)*. Selain itu, *outcome* juga dapat dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup *(lagging indicator),* yang dalam hal ini berarti indikator yang satuannya dapat dianggap lebih luas dari pada atau gabungan dari beberapa indikator kegiatan lain. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun 2025, target kinerja *(performance plan)* ini akan dibandingkan dengan realisasinya *(performance result)*, sehingga diketahui celah kinerja *(perfomance gap)*. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang *(performance improvement).* Pada tahun 2025, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja.

Dengan penilaian sendiri *(self assessment)* berdasarkan metode/cara/langkah kerja, hasil pengukuran kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	81 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Analisis capaian kinerja organisasi Bappelitbangda dinilai dalam dua kelompok yaitu capaian pada tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dengan penilaian sendiri *(self assessment)* berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, maka analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah.	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	98	97	98,98
		Indeks Inovasi Daerah	48	46,75	97,4

Dari tujuan strategis organisasi yang akan dicapai pada tahun 2025, realisasi tingkat capaiannya masuk dalam kategori capaian *sangat baik*. Dengan demikian tujuan organisasi telah tercapai dengan *baik*. Untuk pencapaian sasaran strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	97	100	100
		Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	22,90	22,64	98,86
2	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian IKU RKPD	94	92	98,87
		% PD yang berkinerja tinggi	89,24	91,67	100
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	60	59,97	100

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	84,50	80,20	94,91
		Indeks Inovasi Perangkat Daerah	45	75,68	100
		Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan	75	84,028	100

Pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah maka untuk mengukurnya ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dengan rata-rata capaian adalah 99,43 %, dengan kategori capaian sangat baik. Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan 2 (dua) indikator, maka rata-rata capaiannya adalah 99,44 % atau kategori sangat baik. Pada sasaran ketiga yaitu meningkatnya kualitas inovasi daerah, ada 1 (satu) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan realisasi tingkat capaian indikator 98,8 %, masuk kategori sangat baik. Pada sasaran keempat yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, dengan 3 (tiga) indikator, rata-rata capaiannya adalah 98,3 %, juga masuk kategori sangat baik. Dari indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran strategis organisasi semuanya telah tercapai dengan sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dalam menentukan berbagai kebijakan diperlukan berbagai indikator maupun isu-isu strategis yang berkembang. Salah satu indikator tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dari beberapa tahun terakhir. Analisis atas capaian kinerja tahun 2025 dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra)

No.	Tujuan		Indikator Tujuan		Target Tahun				Realisasi Tahun				Tingkat Capaian (%) Tahun			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase capaian target RPJMD	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	20,00%	40%	60%	98%	19,30%	38,90%	58,70%	97%	96,50%	97,25%	97,83%	98,98%
2	Meningkatkan kualitas Inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	19	23	27	48	25,7	11,1	41,7	46,75	135,26%	48,26%	154,44%	97,40%
3	Meningkatkan tata Kelola internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		32,75	33,5	N/A	N/A	29,6	29,6	N/A	N/A	90,38%	88,36%	N/A	N/A

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tujuan organisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, Persentase Capaian Target RPJMD menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan yang didukung oleh efisiensi penggunaan sumber daya serta ketepatan pelaksanaan program penunjang hingga menyentuh angka 98,98% di tahun 2025. Sebaliknya, fluktuasi tajam terjadi pada Indeks Inovasi Daerah (IID) akibat penetapan angka target awal tahun 2022-2024 yang dibuat terlalu rendah, sehingga capaian riil di lapangan melonjak drastis hingga melampaui 100% pada tahun 2022 (135,26%) dan 2024 (154,44%). Sebagai langkah perbaikan dan solusi alternatif atas ketidakakuratan proyeksi tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan momentum perubahan Renstra untuk memperbaiki dan menaikkan angka target IID periode 2025-2029 menjadi lebih menantang, yang terbukti membuat tingkat capaian tahun 2025 menjadi lebih rasional di angka 97,40%. Sementara itu, mengenai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah yang sempat menunjukkan perbaikan capaian di tahun 2023, indikator ini diputuskan untuk tidak lagi menjadi indikator tujuan Bapperida dalam Renstra Perubahan, sehingga langkah-langkah perbaikan dan evaluasi tata kelola ke depan akan difokuskan secara penuh guna meningkatkan serta mempertahankan kinerja pada dua indikator tujuan utama yang tersisa secara konsisten.

Pencapaian sasaran tahun 2025 dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra)

No.	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Tahun				Realisasi Tahun				Tingkat Capaian (%) Tahun			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	Indeks Perencanaan	95%	100%	100%	97	99,99%	100%	96,75%	100	105,25%	100,00%	96,75%	103,09%
			Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	22,9	23,9	22,9	22,9	22,35	22,53	22,64	22,64	97,60%	94,27%	98,86%	98,86%

No.	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Tahun				Realisasi Tahun				Tingkat Capaian (%) Tahun			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan daerah	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD	Persentase capaian IKU RKPD	95%	100%	95%	94	112,40%	97,78%	93,03%	92	118,32%	97,78%	97,93%	97,87%
			Persentase rata-rata capaian Target IKU Renja PD	% PD yang berkinerja tinggi	88%	100%	95%	89,24	98,75%	88,08%	96,09%	88,89	112,22%	88,08%	101,15%	99,61%
			Persentase Program kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD		98%	100%	99%	-	99,99%	99%	99,62%	-	102,03%	99,00%	100,63%	
3	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	100%	100%	100%	60	100%	100%	100%	59,28	100,00%	100,00%	100,00%	98,80%
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	84,00	86	84,65	84,5	84,65	77,98	83,95	80,2	100,77%	90,67%	99,17%	94,91%
			Persentase Penyerapan Anggaran	-	83%	84%	85%	-	73,44%	69,97%	79,47%	-	88,48%	83,30%	93,49%	

No.	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Tahun				Realisasi Tahun				Tingkat Capaian (%) Tahun			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	pembangunan dan penelitian pengembangan daerah		-	Indeks Inovasi Perangkat Daerah				45				75,68				168,18%
			-	tingkat kepuasan layanan kesekretariatan				75				84,028				112,04%

Berdasarkan data tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025, capaian indikator secara umum menunjukkan tren yang sangat positif berkat efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur dalam mengeksekusi program kerja. Peningkatan kinerja yang signifikan terlihat pada beberapa indikator, seperti Indeks Perencanaan yang sukses mencapai target 103,09% di tahun 2025 serta capaian Indeks Inovasi Perangkat Daerah dan Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan yang melonjak drastis hingga melampaui 100% akibat penetapan baseline target awal tahun 2025 yang terlalu rendah. Di sisi lain, penurunan kinerja minor terjadi pada Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP dan Rata-rata Tingkat Kematangan Inovasi Daerah (98,80%), yang disebabkan oleh kendala integrasi sistem informasi berkala antar-bidang sebagai faktor teknis utama kegagalan pemenuhan target mutlak. Sebagai alternatif solusi dan langkah perbaikan atas ketidakakuratan proyeksi kinerja tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan momentum perubahan Renstra untuk melakukan penyesuaian kembali target tahun 2025 serta memperbaiki dan merumuskan ulang angka target kinerja yang lebih rasional, adaptif, dan menantang untuk periode jangka menengah 2025–2029. Guna keberlanjutan organisasi, langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan mencakup standarisasi sistem pelaporan digital untuk mempertahankan capaian indikator yang telah memenuhi target, sekaligus melakukan asistensi intensif serta evaluasi berkala pada unit kerja penanggung jawab bagi indikator-indikator yang belum tercapai 100% agar kinerjanya meningkat konsisten.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Untuk melihat ketercapaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah, akhir dari periode rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025
dengan Target Tahun 2030

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2030	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025	+ / - (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	100,00%	97%	97,00%
		Indeks Inovasi Daerah	100	46,75	46,75%

Dari tujuan strategis yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2030, maka capaian tahun 2025 di awal periode jangka menengah untuk indikator capaian target jangka menengah daerah telah tercapai 97%, sedangkan indeks inovasi daerah baru tercapai 46,75%.

Untuk perbandingan capaian sasaran tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025
dengan Target Tahun 2030

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian Tahun 2030	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025	(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	· Indeks Perencanaan	100	100	100,00%
		· Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	30	22,64	75,47%
2	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	· Persentase capaian IKU Renja RKPD	96,5	92	95,34%
		· % PD yang berkinerja tinggi	91,74	91,67	99,92%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian Tahun 2030	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025	(%)
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	· Rata-rata tingkat kematangan inovasi daerah	90	59,97	66,63%
4	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan perangkat daerah	· Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	80,2	92,18%
		· Indeks Inovasi PD	70	75,68	108,11%
		· Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan	85	84,028	98,86%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode perencanaan tahun 2030, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik hingga sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, Indeks Perencanaan telah mencapai target 2030 sebesar 100%, namun Nilai Komponen Perencanaan SAKIP baru mencapai 75% dari target. Sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah menunjukkan kinerja tinggi dengan capaian IKU Renja RKPD sebesar 95% dan persentase perangkat daerah berkinerja tinggi sebesar 99,92% dari target 2030. Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah, capaian tingkat kematangan inovasi daerah baru mencapai 66%, yang menunjukkan masih adanya gap signifikan terhadap target akhir dan membutuhkan percepatan pengembangan inovasi. Pada sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, sebagian besar indikator telah mendekati bahkan melampaui target, seperti Indeks Inovasi Perangkat Daerah yang mencapai 100% dan tingkat kepuasan layanan kesekretariatan sebesar 99%, sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 92%, sehingga secara keseluruhan tata kelola pemerintahan menunjukkan tren kinerja yang positif menuju target akhir periode 2030.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu:

a. Adanya komitmen yang tinggi dari Bupati dengan mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuat inovasi.

b. Adanya komitmen yang tinggi dari Bappelitbangda untuk selalu memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran.

c. Dilaksanakannya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait penumbuhan inovasi.

d. Pembinaan yang lebih intensif melalui bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

e. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu:

a. Inovasi yang dihasilkan belum teradministrasi secara lengkap sesuai ketentuan.

b. Belum optimalnya pengetahuan perencanaan dan penganggaran.

c. Pelaksanaan proses/tahapan perencanaan dan penganggaran belum berjalan baik.

d. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

e. Adanya perubahan kebijakan/peraturan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

Dalam rangka mengantisipasi hambatan serta mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pencapaian sasaran strategis, Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerapkan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

a. Optimalisasi Sistem Informasi Inovasi Daerah (SI IDE HST) yaitu memaksimalkan pemanfaatan platform digital Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai instrumen utama untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mempublikasikan seluruh berkas inovasi Perangkat Daerah secara elektronik guna mengatasi kendala kelengkapan administrasi inovasi agar sesuai dengan ketentuan nasional.

b. Akselerasi Kapasitas SDM Perencana secara berkelanjutan dengan menyelenggarakan orientasi teknis, coaching clinic, dan asistensi penganggaran dan perencanaan secara intensif guna mengatasi keterbatasan pengetahuan aparatur perencana sekaligus memastikan tahapan perencanaan berjalan tepat waktu dan linier dengan target daerah.

c. Penguatan Pengendalian Terpadu melalui SAKTIPUN dengan melakukan pemutakhiran sistem akuntabilitas dari aplikasi SImontok menjadi SAKTIPUN (Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi untuk Pemerintahan Unggul) untuk mempertajam fungsi pengawasan proses perencanaan, mengukur capaian secara akurat, serta memitigasi deviasi pelaksanaan program kerja sejak dini.

d. Optimalisasi Aplikasi SIPD-RI berkelanjutan dengan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemutakhiran berkala aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, serta mengoptimalkan tim fasilitasi teknis (*helpdesk*) internal Bapperida untuk menjamin kelancaran input perencanaan dan penganggaran.

e. Menerapkan pemberian penghargaan (reward) bagi unit kerja yang kreatif dan berdaya saing melalui program MIA (Murakata Innovation Award).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya terbesar dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah adalah pendanaan yang termuat dalam DPA Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan, pada awal tahun 2025 telah dianggarkan belanja sebesar Rp 11.023.610.143,00 untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran terjadi Pergeseran anggaran. Anggaran Bappelitbangda menjadi Rp 10.177.247.649,00. Dari pagu belanja tersebut, realisasi anggaran adalah Rp 7.841.089.632,00 atau sebesar 77,05%. Realisasi ini mencerminkan bahwa rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih masuk dalam kategori cukup. Realisasi anggaran yang hanya mencapai 77,05% disebabkan karena adanya efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu menurunnya kinerja penyerapan anggaran juga disebabkan oleh adanya peraturan/kebijakan sehingga perlu diperbaiki penganggarannya melalui pergeseran APBD. Selain itu juga dengan berbagai agenda yang padat dari Pemerintah Daerah yang melibatkan Bappelitbangda sehingga beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan beberapa kali, dalam realisasinya tidak bisa terlaksana penuh. Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Rata-rata Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.311.300.250	99,43	90,89	8,54

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Rata-rata Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
2.	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	1.148.253.100	99,44	78,71	20,03
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	1.604.333.050	98,8	84,68	14,12
4.	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan perangkat daerah	6.113.361.249	98,3	71,76	14,12

Dari tabel terlihat bahwa ada terjadi efisiensi sumber daya anggaran antara 8 – 20 % pada semua capaian pelaksanaan sasaran strategis. Untuk efisiensi program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Rata-rata Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.311.300.250	100	90,89	9,11
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.148.253.100	100	78,71	21,29
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.604.333.050	100	84,68	15,32
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	6.113.361.249	100	71,76	28,24

Dari 4 (empat) program yang dijalankan, maka sebagian besar terjadi efisiensi penggunaan sumber daya yang berkisar antara 9 % - 29 %. Sumber daya lainnya adalah SDM. Pada awal tahun 2025, jumlah pegawai di Bappelitbangda sebanyak 30 orang dengan komposisi sebagai berikut: Pejabat struktural 7 orang, pejabat fungsional tertentu 4 orang, pelaksana/fungsional umum 4 orang, PPPK 1 orang, tenaga teknis 8 orang, dan tenaga teknis administrasi 6 orang. Sedangkan di akhir tahun, total pegawai berjumlah 44 orang dengan komposisi sebagai berikut: Pejabat struktural 8 orang, pejabat fungsional tertentu 7 orang, pelaksana/fungsional umum 5 orang, PPPK 2 orang, tenaga

teknis 6 orang, tenaga teknis administrasi 4 orang, dan tenaga alih daya (*outsourcing*) 12 orang. Dengan efisiensi yang dilakukan terhadap sumber daya baik keuangan, manusia dan peralatan, maka capaian kinerja strategis dapat dicapai dengan kategori baik.

6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran dan tujuan tidak terlepas dari pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja program. Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, evaluasi kinerja masing-masing kegiatan dan program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja
Untuk Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
-1	-2	-3	-4	-5
[PROGRAM]PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu	100	100	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100	90	90%
[KEGIATAN]Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan standart dokumen perencanaan	100	100	100%
	% partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	90	100	100%
[SUB KEGIATAN]Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3	3	100%
[KEGIATAN]Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaporan sesuai standart dan tepat waktu	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	8	100%
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD	100	100	100%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
[KEGIATAN]Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100%
[KEGIATAN]Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	100%
[KEGIATAN]Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	2	100%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	1	100%
[PROGRAM]PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil litbang yg ditindaklanjuti untuk penyusunan kebijakan daerah (ada yang menjadi inovasi)	100	100	100%
	Persentase pemanfaatan hasil litbang (menjadi Inovasi)	100	100	100%
[KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	1	100%
[KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan kan	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Topik Kajian Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang terlaksana	1	0	0%
[SUB KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	1	100%
[KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	100%
[KEGIATAN]Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100%
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan Pemeriksaan/audit yang ditindaklanjuti	100	100	100%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
	Persentase Administrasi BMD yang lengkap dan sesuai	100	100	100%
	Persentase pegawai yang berkinerja baik	100	100	100%
	Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian yang ditindaklanjuti	100	100	100%
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang selesai	100	100	100%
	Persentase Penyediaan Dokumen Anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100%
[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi sesuai standart dan selesai tepat waktu	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100%
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	100	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oran g yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	224	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%
[SUB KEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	100%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
	Keuangan Akhir Tahun SKPD			
[SUB KEGIATAN]Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4	100%
[SUB KEGIATAN]Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%
[KEGIATAN]Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi BMD PD Tepat Waktu	100	94,72	95%
[SUB KEGIATAN]Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	4	33%
[KEGIATAN]Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Pegawai PD yang dilayani tepat waktu	100	96,93	97%
[SUB KEGIATAN]Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	100%
[SUB KEGIATAN]Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	20	100%
[SUB KEGIATAN]Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Oran g yan g Men gikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	100%
[SUB KEGIATAN]Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	10	0	0%
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100	70,02	70%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ban gunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Lo gistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	730	730	100%
[SUB KEGIATAN]Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	100%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2025		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
[SUB KEGIATAN]Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100%
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	90,15	90%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81	81	100%
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	98,94	99%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22	100%
[SUB KEGIATAN]Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	20	67%
[SUB KEGIATAN]Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100%
[SUB KEGIATAN]Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20	20	100%

Berdasarkan hasil evaluasi capaian tabel kinerja tahun 2025, faktor utama keberhasilan pencapaian target didorong oleh optimalnya pelaksanaan program-program penunjang urusan pemerintahan daerah, khususnya administrasi keuangan, kepegawaian, dan penataan organisasi perangkat daerah yang berhasil mencapai realisasi target 100% secara konsisten. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen kuat dalam pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pengalokasian anggaran operasional pada kegiatan kesekretariatan. Sebaliknya, beberapa program pembangunan sektoral, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi perencanaan makro dan pengarusutamaan inovasi daerah, mengalami deviasi atau penurunan minor akibat kendala teknis dalam pemenuhan dokumen administrasi yang belum selaras dengan regulasi nasional terbaru. Penurunan capaian ini dipengaruhi pula oleh dinamika perubahan kebijakan anggaran di tingkat pusat yang berdampak langsung pada kelancaran eksekusi tahapan sub-kegiatan strategis di lapangan.

Dalam menyikapi capaian indikator tersebut, Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah merumuskan langkah untuk menjamin keberlanjutan kinerja organisasi di masa mendatang. Bagi indikator yang telah berhasil memenuhi atau melampaui target (di atas 100%), langkah yang akan dilakukan adalah mempertahankan performa melalui standarisasi sistem pelaporan digital secara berkala serta mengoptimalkan penggunaan **Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah** sebagai platform publikasi yang kolaboratif dan berdaya saing. Sementara itu, sebagai langkah perbaikan bagi indikator kinerja atau program yang belum tercapai maksimal, Bapperida HST melakukan penguatan pengendalian internal secara terpadu dengan mengandalkan aplikasi **SAKTIPUN (Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi untuk Pemerintahan Unggul)** yang di-*upgrade* dari sistem SImontok sebelumnya. Implementasi SAKTIPUN, yang terinspirasi dari kearifan lokal Banjar *"geh pun"* sebagai bentuk penegasan komitmen, akan diikuti dengan asistensi intensif (*coaching clinic*) dan bimbingan teknis substantif kepada aparatur perencana demi mempercepat penyerapan anggaran, memperbaiki tata kelola administrasi yang kurang, serta memastikan seluruh target sasaran strategis terpenuhi secara akurat dan akuntabel.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2025 masing-masing program dan kegiatan terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.11
Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan	**Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2025**		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-1	-2	-3	-4
[PROGRAM]PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.311.300.250	1.191.846.595	90,89%
[KEGIATAN] Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.214.265.050	1.105.604.495	91,05%
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Konsultasi Publik	37.063.200	30.825.400	83,17%
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	151.698.900	131.764.100	86,86%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.025.502.950	943.014.995	91,96%
[KEGIATAN] Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	97.035.200	86.242.100	88,88%
[SUBKEGIATAN] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	97.035.200	86.242.100	88,88%
[PROGRAM] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.148.253.100	903.769.635	78,71%
[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	389.839.850	318.654.218	81,74%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.907.700	18.861.850	86,10%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	80.981.100	41.154.358	50,82%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.804.750	50.771.129	74,88%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	219.866.300	207.866.881	94,54%
[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	156.098.050	125.691.389	80,52%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.606.700	13.263.750	97,48%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	142.491.350	112.427.639	78,90%
[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	602.315.200	459.424.028	76,28%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.298.000	14.726.000	96,26%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	587.017.200	444.698.028	75,76%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
[PROGRAM] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68%
[KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	231.493.000	225.444.680	97,39%
[SUBKEGIATAN] Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	231.493.000	225.444.680	97,39%
[KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	770.368.900	749.879.670	97,34%
[SUBKEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	527.227.200	518.977.070	98,44%
[SUBKEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	
[SUBKEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	243.141.700	230.902.600	94,97%
[KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	390.496.000	197.020.496	50,45%
[SUBKEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	390.496.000	197.020.496	50,45%
[KEGIATAN] Pengembangan Inovasi dan Teknologi	211.975.150	186.128.127	87,81%
[SUBKEGIATAN] Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	181.850.100	163.882.277	90,12%
[SUBKEGIATAN] Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	30.125.050	22.245.850	73,85%
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.113.361.249	4.387.000.429	71,76%
[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.536.348	17.944.650	73,13%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.124.700	5.003.400	54,83%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.304.100	3.445.000	80,04%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.438.200	2.865.800	83,35%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.998.598	3.760.400	94,04%
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.670.750	2.870.050	78,19%
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.061.452.135	2.688.893.469	66,21%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.821.074.086	2.460.633.483	64,40%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.320.000	198.810.000	96,83%
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.650.680	5.362.280	94,90%
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.461.869	5.849.950	90,53%
[SUBKEGIATAN]Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.983.000	17.851.756	81,21%
[SUBKEGIATAN]Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	962.500	386.000	40,10%
[KEGIATAN]Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.353.800	4.123.800	94,72%
[SUBKEGIATAN]Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.353.800	4.123.800	94,72%
[KEGIATAN]Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.490.346	158.467.970	96,93%
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6.729.996	5.665.000	84,18%
[SUBKEGIATAN]Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	124.500.000	122.727.690	98,58%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
[SUBKEGIATAN]Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.320.200	6.320.200	100,00%
[SUBKEGIATAN]Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.940.150	23.755.080	91,58%
[SUBKEGIATAN]Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah	968.236.400	677.986.666	70,02%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.994.000	1.994.000	100,00%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.665.200	310.775.800	95,14%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.274.200	66.977.800	99,56%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.000.000	18.987.400	99,93%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.920.000	96,00%
[SUBKEGIATAN]Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.300.000	47.292.670	99,98%
[SUBKEGIATAN]Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.003.000	230.038.996	45,64%
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.570.220	433.220.003	90,15%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.484.220	1.473.000	99,24%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.240.000	59.054.843	82,90%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.846.000	372.692.160	91,38%
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.722.000	406.363.871	98,94%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.764.000	65.076.900	98,96%
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.218.000	114.650.037	96,98%
[SUBKEGIATAN]Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.300.000	19.295.000	99,97%
[SUBKEGIATAN]Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.140.000	189.041.934	99,95%
[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000	18.300.000	100,00%

Keberhasilan pencapaian target kinerja didominasi oleh efektivitas pelaksanaan program-program penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditandai dengan persentase realisasi keuangan sangat tinggi, bahkan sebagian besar menyentuh angka 99% hingga 100%. Pada urusan kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, serta penataan organisasi perangkat daerah menjadi pendorong utama keberhasilan karena serapan anggarannya berjalan linier dengan keluaran (*output*) yang direncanakan. Faktor keberhasilan ini didukung oleh optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola internal organisasi. Di sisi lain, indikasi hambatan teridentifikasi pada beberapa sub-kegiatan dengan nilai anggaran nol, yang menunjukkan bahwa sub-kegiatan yang bersangkutan telah resmi dihapus dari system penganggaran disebabkan oleh adanya penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat yang membatasi ruang eksekusi anggaran di lapangan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Organisasi lainnya

a. Perbandingan Nilai SAKIP

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggung jawab penuh atas kualitas dokumen perencanaan yang menjadi pilar utama penilaian komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kabupaten (bobotnya mencapai 30%).

Tabel III.12

Perbandingan Nilai SAKIP se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2025

No.	Instansi Pemerintah	2024		2025	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	82,04	A	82,59	A
2	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	84,07	A	84,19	A
3	Pemerintah Kabupaten Balangan	72,09	BB	77,1	BB
4	Pemerintah Kabupaten Tapin	71,00	BB	74,24	BB
5	Pemerintah Kota Banjarmasin	70,70	BB	72,38	BB
6	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	70,16	BB	72,06	BB
7	Pemerintah Kabupaten Banjar	67,06	B	71,16	BB
8	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	70,20	BB	71,06	BB
9	Pemerintah Kota Banjarbaru	66,83	B	68,91	B
10	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	67,09	B	68,22	B
11	Pemerintah Kabupaten Tabalong	67,10	B	67,66	B
12	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	68,01	B	67,19	B
13	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	64,82	B	65,85	B
14	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	61,78	B	64,8	B

Sumber: Kementrian PAN-RB RI

Berdasarkan data hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 berhasil mempertahankan **Predikat BB** dengan capaian nilai **71,06**, mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang berada di angka **70,20**. Jika disandingkan secara regional, capaian akuntabilitas Kabupaten HST berada pada posisi ke-8 dari 14 Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, serta menempati peringkat ke-3 di wilayah Banua Enam (di bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan). Nilai akuntabilitas HST ini tercatat lebih unggul dibandingkan beberapa daerah tetangga terdekat seperti Kabupaten Tabalong (67,66) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (65,85) yang masih tertahan pada Predikat B.

b. Perbandingan Indeks Inovasi Daerah

Nilai IID Kabupaten HST sebesar **46,75 (Predikat Inovatif)** yang dikeluarkan oleh Kemendagri merupakan hasil dari kontribusi Bappelitbangda dalam memfasilitasi ekosistem inovasi daerah yaitu dengan pengelolaan Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (SI IDE HST) serta pelaksanaan sosialisasi inovasi ke seluruh perangkat daerah.

Tabel III.13

Perbandingan Indeks Inovasi Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No.	Instansi Pemerintah	2025	
		Nilai	Predikat
1	Pemerintah Kabupaten Balangan	96,80	Sangat Inovatif
2	Pemerintah Kabupaten Tabalong	92,09	Sangat Inovatif
3	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	73,59	Sangat Inovatif
4	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	73,58	Sangat Inovatif
5	Pemerintah Kabupaten Tapin	72,76	Sangat Inovatif
6	Pemerintah Kota Banjarmasin	62,95	Inovatif
7	Pemerintah Kabupaten Banjar	60,71	Inovatif
8	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	56,40	Inovatif
9	Pemerintah Kota Banjarbaru	56,19	Inovatif
10	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	51,38	Inovatif
11	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	49,82	Inovatif
12	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	48,03	Inovatif
13	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	46,75	Inovatif
14	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	46,31	Inovatif

Sumber: Kementrian Dalam Negeri RI

Berdasarkan data pada tabel perbandingan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati peringkat ke-13 dari 14 instansi pemerintah yang dinilai di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian nilai sebesar **46,75** dan menyandang predikat **Inovatif**. Meskipun posisi secara regional berada di kluster bawah, capaian ini berhasil melampaui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di posisi paling bawah (46,31). Namun, hasil evaluasi ini memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan apabila disandingkan dengan daerah tetangga di wilayah Banua Enam yang memimpin di posisi puncak, seperti Kabupaten Balangan yang meraih nilai tertinggi sebesar 96,80 (Sangat Inovatif) dan Kabupaten Tabalong di peringkat kedua dengan nilai 92,09 (Sangat Inovatif). Kesenjangan nilai ini secara teknis menjadi indikasi bahwa intensitas penumbuhan dan pemenuhan dokumen pendukung inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memerlukan akselerasi jika dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah pembanding tersebut.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kab. HST disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025–2029 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang ingin dicapai dalam rangka perwujudan *good governance.*

Laporan ini memberi gambaran tentang pencapaian sasaran strategis yang mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025–2029. Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) tujuan dan 4 sasaran serta 4 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp10.177.247.649,00, sedangkan realisasi anggarannya berjumlah Rp7.841.089.632,00 atau sebesar 77,05 % yang termasuk dalam kategori tingkat capaian kinerja baik. Dari uraian tentang akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2025 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,19 % dari target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian adalah 98,94 % dari target yang ditetapkan.
3. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan.
4. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan pada aspek kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kualitas layanan internal perangkat daerah juga menunjukkan hasil yang baik, Sebaliknya, penurunan capaian kinerja terjadi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat kematangan inovasi.
5. Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu nilai komponen perencanaan SAKIP dan inovasi daerah.

B. LANGKAH TINDAK LANJUT

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda seperti:

1. Kualitas dan kuantitas SDM serta komitmen SDM perencana baik di Bappelitbangda sendiri maupun pada Perangkat Daerah lainnya.
2. Keterlibatan personel Bappelitbangda di kegiatan-kegiatan perangkat daerah lain.
3. Adanya perubahan kebijakan / peraturan sehingga perlu perubahan anggaran.
4. Jadwal perencanaan dan penganggaran yang tidak berjalan lancar dan lain-lain.

Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang maka tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain adalah:

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan langkah perangkat daerah lainnya dan komitmen semua pihak untuk menepati jadwal dan proses perencanaan.
2. Perlunya peningkatan kapasitas dan wawasan SDM Bappelitbangda dan SDM perencana perangkat daerah lain.
3. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga kualitasnya meningkat.
4. Perlu adanya peningkatan strategi dan usaha yang lebih keras lagi dalam upaya pencapaian target kinerja.
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak yang terkait.
6. Penyusunan mitigasi risiko dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang lebih baik.
7. Penyusunan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja.

LKIP ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan kebijakan yang akan datang.